



Diplomasi Indonesia Dalam Forum Indonesia – Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) Sebagai Upaya Mengatasi Segregasi Papua

Dewa Putu Bhagastya Dharma

Yedi Mulya Permana

Penny Kurnia Putri



Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana

* Correspondence: bhagastyadharma@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the steps taken by the IPPP Forum regarding the Papua issue in the framework of parliamentary diplomacy and the power of narrative. The methodology used is qualitative research, involving data collection from official websites, conference reports, journal articles, and related news sources. The findings show that the IPPP's efforts to build cooperative relationships and utilize the forum as a means of controlling the narrative have been successful, influencing the decisions of Pacific countries not to support the pro-Papuan separatist movement. These efforts resulted in successful diplomatic engagement through cooperation within the IPPP Forum and the effective application of influence through narratives aligned with the Indonesian government's objectives. These findings suggest that parliamentary diplomacy by the IPPP can positively influence efforts to resolve the Papua issue and can be an alternative in conflict resolution.

Keywords: Parliamentary Diplomacy, IPPP, Narrative Power, Segregation

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah apa yang telah diambil oleh Forum IPPP terkait isu Papua dalam kerangka Diplomasi parlemen dan Kekuatan narasi. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif, melibatkan pengumpulan data dari situs web resmi, laporan konferensi, artikel jurnal, dan sumber berita terkait. Temuan menunjukkan bahwa upaya IPPP untuk membangun hubungan kooperatif dan memanfaatkan forum sebagai sarana mengendalikan narasi berhasil, mempengaruhi keputusan negara-negara Pasifik untuk tidak mendukung gerakan pro segregasi Papua. Upaya ini menghasilkan keterlibatan diplomatik yang sukses melalui kerja sama di dalam Forum IPPP dan penerapan pengaruh yang efektif melalui narasi yang sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia. Temuan ini menyarankan bahwa diplomasi parlemen oleh IPPP dapat secara positif mempengaruhi upaya penyelesaian isu Papua dan dapat menjadi alternatif dalam resolusi konflik.

Kata Kunci: Diplomasi Parlemen, IPPP, Kekuatan Naratif, Segregasi

I. Pendahuluan

Pendahuluan

Isu segregasi Papua tetap menjadi salah satu tantangan paling kompleks dalam kepentingan nasional Indonesia. Sejak integrasi Papua melalui PEPERA pada tahun 1969, dinamika sosial, politik, dan ekonomi di wilayah tersebut telah memicu gerakan segregasi yang diwakili oleh berbagai faksi seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan yang berafiliasi dengan organisasi internasional seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Dukungan terhadap ideologi segregasi oleh beberapa negara Pasifik dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan, sehingga memerlukan pendekatan diplomatik yang hati-hati dan berkelanjutan. Akibatnya, diplomasi parlemen melalui Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) digunakan sebagai alternatif untuk mengurangi dukungan eksternal terhadap segregasi Papua,

sekaligus memperkuat komunikasi, kerja sama, dan pemahaman antarparlemen di kawasan tersebut. (Rumbiak, 2015; United Nations, 2024; Wideslatu, 2024)

Secara historis, integrasi Papua ke dalam Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1969, menjadikannya provinsi paling timur Indonesia, kaya akan sumber daya alam, dan menempati posisi strategis penting dalam kepulauan. Namun, ketimpangan pembangunan, ketidaksetaraan sosial-ekonomi, dan sengketa pengelolaan sumber daya memicu perlawanan dari kelompok masyarakat tertentu, terutama Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang telah mengemukakan aspirasi segregasi sejak tahun 1960-an. Pada tahun 1977, serangan terhadap infrastruktur pertambangan memicu eskalasi kekerasan, yang diikuti dengan tindakan balasan dari pasukan keamanan. Pada 1980-an, isu Papua mulai menarik perhatian internasional, dengan Vanuatu menjadi pendukung utama argumen dukungan segregasi. (Warsudi, 2023; BBC, 2025; Premdas, 1985; Tawakal, Hakiem, & Rifai, 2024)

Di kawasan Pasifik, ULMWP telah menempatkan dirinya sebagai organisasi payung bagi kelompok-kelompok segregasi seperti NFRPB (National Federal Republic of West Papua), PNWP (National Parliament of West Papua), dan WPNC (West Papua National Coalition for Liberation). Secara bersamaan, sejak 2015, ULMWP berusaha memperoleh legitimasi politik melalui status pengamatnya di dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Dari pandangan hukum internasional sering menggambarkan ULMWP sebagai organisasi politik dengan kesatuan politik yang sah. Namun, pada KTT MSG 2023, permohonan keanggotaan formal ULMWP ditolak karena tidak memenuhi kriteria perjanjian pendirian MSG dan tidak mendapatkan konsensus di antara negara-negara anggota. Situasi ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan segregasi bersifat fluktuatif dan bergantung pada perhitungan strategis negara-negara Melanesia terkait hubungan mereka dengan Indonesia. (Rahim & Timur, 2021; CNN Indonesia, 2023; Wideslatu, 2024)

Secara domestik, pemerintah Indonesia menggambarkan OPM sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang harus ditangani oleh pasukan keamanan, menghindari penggunaan bahasa yang menginternasionalkan konflik. Penetapan OPM sebagai organisasi teroris domestik oleh badan intelijen terkait dengan serangkaian serangan terhadap warga sipil dan fasilitas publik. Operasi terpadu seperti Operasi Damai Cartenz (setelah Nemangkawi) mencerminkan pendekatan yang memadukan upaya penegakan hukum dan upaya *soft approach*. (CNN Indonesia, 2021; Tempo, 2024; Bloomberg Technoz, 2024)

Selain itu, dukungan politik negara-negara Pasifik terhadap isu Papua sering diangkat dalam forum multilateral seperti sidang PBB, dengan Vanuatu memimpin khususnya dari 2016 hingga 2021. Dukungan ini dapat dijelaskan oleh identitas Melanesia yang sama, aspirasi untuk kepemimpinan regional, dan proyeksi kebijakan luar negeri negara-negara pulau Pasifik yang berusaha memperkuat kehadiran mereka di panggung internasional melalui isu yang sangat simbolis. (CNBC Indonesia, 2021; Kusuma, Widhiyoga, & Murdani, 2021)

Dalam merespons eksternalisasi isu Papua, Pemerintah Indonesia memperluas jangkauan diplomasi ke Pasifik melalui *Look East Policy*, *Indonesian AID*, *Pacific Business Engagement*, program beasiswa seni-budaya (BSBI), serta berbagai inisiatif ekonomi biru dan kerja sama pertahanan. Meski signifikan, evaluasi atas program-program tersebut mengindikasikan perlunya kanal komunikasi yang lebih intensif, terlembaga, dan berkelanjutan agar manajemen isu berjalan konsisten melampaui *one-off events*. Kesenjangan inilah yang mendorong peran diplomasi parlemen menjadi semakin relevan. (Prasetyo & Zahidi, 2022)

Secara teoretis, diplomasi dipahami Diplomasi pada umumnya didefinisikan sebagai kegiatan politik dan unsur kunci negara dalam mencapai kebijakan luar negeri yang melibatkan negosiasi, komunikasi, pembentukan hubungan baik yang dilakukan oleh pejabat negara dan pihak lain melalui berbagai saluran (Berridge, 2015). Masyarakat umum memahami diplomasi dan actor yang melaksanakannya hanya oleh Presiden dan Kementerian Luar Negeri. Namun, diperkembangan mutakhir, praktik diplomasi merambah ke banyak actor yang berbentuk *multi-track diplomacy*. Hal ini berarti menempatkan lembaga diluar eksekutif seperti lembaga legislatif sebagai aktor yang dapat menjembatani politik antarnegara dengan fleksibilitas representatif. Dalam kerangka “*1½ track diplomacy*”, diplomasi parlemen mampu menggabungkan kredibilitas dengan kepekaan wakil rakyat yang diperlukan untuk resolusi konflik, advokasi isu publik, dan pembentukan koalisi parlemen (pengambil keputusan) lintas negara. (Goumenos, 2018; Athira, 2024)

Mandat formal DPR RI untuk membantu penyelenggaraan politik luar negeri tercantum dalam UU No. 37/1999 dan UU No. 17/2014, dengan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai perpanjangan tangan legislatif dalam hubungan diplomasi parlemen yang melakukan keterlibatan bilateral maupun multilateral. Dari kerangka mandat ini lahir IPPP, forum yang dirancang untuk memperkuat konektivitas regional terkhusus di Kawasan Pasifik. Hal ini meliputi diskusi kerja sama maritim, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia, sekaligus menegaskan prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan. (KSAP DPR RI, n.d)

IPPP pertama (Jakarta, 23 - 24 Juli 2018) menekankan tiga tema forum siding, yakni: *Building Partnership For Future Development, Parliamentary Drives to Promote Potential of Blue Economy to Ensure Sustainable Development of Marine Resources, Human Capital Development As A New Driving Force for Economic Growth in Indonesia – Pacific Partnership*. Forum ini juga menyepakati pentingnya konektivitas regional dan non-intervensi dalam urusan domestik negara peserta. Pertemuan kedua (Jakarta, 25–26 Juli 2024) memperluas cakupan pada “*Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development*”, serta menekankan komitmen bersama untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional di bawah prinsip saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial tiap negara. Dalam IPPP Kedua ini, terdapat sesi tertutup yang membahas secara khusus isu Papua, yaitu *MSG Parliamentary Dialogue*. DPR RI menyatakan narasi pembangunan Papua oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya dan pekerjaan rumah negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Papua. Pernyataan ini yang diterima oleh sejumlah pemimpin parlemen Pasifik dengan penekanan pada penghormatan kedaulatan Indonesia dan perlunya kelanjutan dialog antarparlemen. (KSAP DPR RI, 2018; KSAP DPR RI, 2024)

Di tingkat konseptual, tulisan ini juga mengintegrasikan konsep *kekuatan naratif (narrative power)* sebagai salah satu pisau analisis untuk memahami bagaimana IPPP bekerja mengelola persepsi, makna, dan respons aktor kawasan terhadap isu Papua. Narasi bukan hanya sebuah “cerita”, melainkan segala perangkat yang menyusun peristiwa ke dalam pernyataan simbolik dengan tujuan untuk memobilisasi aksi kolektif, memengaruhi interpretasi, dan merekonstruksi identitas, baik identitas Indonesia sebagai bagian dari dunia Melanesia maupun realitas Kawasan Papua dalam bingkai pembangunan dan inklusi. Dengan memadukan produksi narasi (oleh narator, parlemen Indonesia), peredarannya (melalui platform IPPP dan dialog MSG), serta penerimanya (oleh pemangku kepentingan negara – negara Pasifik), IPPP dimaknai sebagai arena di mana cerita tentang Papua dipertukarkan untuk membentuk *common ground* yang menekan internasionalisasi konflik dan memulihkan prinsip non-intervensi. (Hagström & Gustafsson, 2019; Gang, 2022)

Berangkat dari latar di atas, urgensi penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, perlunya evaluasi komprehensif terkait keberhasilan ediplomasi parlemen dalam pengimplementasian Forum IPPP untuk memengaruhi keputusan politik negara-negara di Kawasan Pasifik sehingga dukungan terhadap narasi pro-segregasi berkurang. Kedua, perlunya penelaahan bagaimana proses atau manajemen narasi yang dibawa DPR RI melalui IPPP mampu membingkai isu Papua sebagai masalah internal negara yang cukup hanya memerlukan penyelesaian dari dalam bukan menggembor-gemborkan (internasionalisasi) isu, sembari mengomunikasikan upaya pembangunan yang konkret untuk mengatasi akar ketidakpuasan, seperti ketimpangan sosial-ekonomi dan akses layanan publik. Dengan begitu, kontribusi akademik tulisan ini tidak hanya mengisi celah kajian diplomasi parlemen Indonesia, tetapi juga menawarkan kerangka operasional untuk menggunakan narasi sebagai bentuk minimalisir eksalasi konflik lintas batas (KSAP DPR RI, 2018; KSAP DPR RI, 2024; Prasetyo & Zahidi, 2022; The Conversation, 2017)

Di tingkat praktik, IPPP berfungsi dalam penyediaan implementasi dalam bentuk *diplomatic engagement* yang relatif bebas, tidak kaku, dan lebih fleksibel dalam upaya membangun relasi *people-to-people* yang dibutuhkan negara-negara di Kawasan Pasifik. Dialog tematik tentang ekonomi biru, konektivitas maritim, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan tidak hanya memproduksi modal sosial untuk kerja sama, melainkan juga menyisipkan narasi bahwa Indonesia masih dengan giat mengupayakan Papua menjadi prioritas pembangunan Indonesia. Dalam IPPP juga dibicarakan berbagai isu dan pesan yang relevan dengan kepekaan negara-negara Kawasan Pasifik layaknya isu maritim, ketahanan iklim, dan kesejahteraan komunitas pesisir. Dalam konteks ini, IPPP bertindak sebagai “ruang aman” untuk menyamakan persepsi, mengurai miskonsepsi, dan membangun angka keberpihakan yang berupaya mengurangi dukungan terhadap gerakan pro-segregasi seperti ULMWP, tanpa mengusik atau menyerang bentuk identitas serta solidaritas Melanesia. (KSAP DPR RI, 2018; KSAP DPR RI, 2024; Wyeth, 2023)

Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa IPPP adalah strategi diplomasi parlemen yang dirancang untuk dua tujuan yang saling terkait: meredam dukungan eksternal terhadap segregasi Papua melalui keterlibatan diplomatik yang berkelanjutan dan melihat manajemen atau pengelolaan narasi isu terkait. Kajian ini akan menunjukkan bahwa keberhasilan IPPP diukur bukan semata pada pernyataan akhir pertemuan, melainkan pada perubahan preferensi dan kalkulasi negara-negara Pasifik terhadap isu dukungan gerakan pro-segregasi Papua, misalnya dalam keputusan MSG atas aplikasi ULMWP, serta pada konsistensi kanal komunikasi antarparlemen yang menjaga isu segregasi Papua tetap berada dalam pembahasan kapabilitas pembangunan oleh pemerintahan Indonesia, bukan suatu isu internasional yang memerlukan perhatian internasional. (CNN Indonesia, 2023; KSAP DPR RI, 2024)

Akhirnya, tulisan ini berkontribusi pada penguatan landasan teoritis dan praktis diplomasi parlemen Indonesia. Di tingkat teoritis, ia mempertautkan konsep *narrative power* dengan praktik *multi-track diplomacy* untuk mentranslasikan bagaimana cerita yang disusun oleh DPR RI tentang dukungan terhadap gerakan pro-segregasi Papua di Kawasan Pasifik mengubah medan makna dan preferensi di Kawasan tersebut. Di tingkat praktis, tulisan ini berusaha untuk memberikan rekomendasi pengetahuan terkait pengelolaan isu sensitif terkhususnya dukungan terhadap gerakan pro-segregasi Papua. Dalam tulisan ini memberikan rekomendasi atas penanganan isu dukungan luar negara dengan bentuk pembangunan yang terukur, penegakan hukum yang akuntabel, dan diplomasi naratif yang berkelanjutan, di mana IPPP menjadi platform untuk mengatur ketiganya secara koheren, minim polarisasi, dan sesuai prinsip non-intervensi. (Hagström & Gustafsson, 2019; Goumenos, 2018; KSAP DPR RI, 2018).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena diplomasi parlemen di Indonesia, khususnya fokus pada bagaimana diplomasi parlemen tersebut menekan dukungan terhadap isu segregasi Papua di kalangan negara-negara Pasifik melalui forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP). Metode kualitatif dipilih karena sesuai untuk menganalisis proses, dinamika, makna yang terkandung dalam interaksi antarparlemen, serta strategi naratif yang digunakan oleh Indonesia. Seperti yang dicatat oleh Sutopo dan Arif (2010), penelitian kualitatif berfokus pada mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial, sikap, dan persepsi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Sementara itu, Moleong (2013) menekankan penelitian kualitatif bersifat komprehensif dan bergantung pada konteks dari metode ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana IPPP berfungsi sebagai sarana alternatif diplomasi melalui manajemen narasi dan keterlibatan diplomatik.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang berfokus pada penggambaran mendalam fenomena diplomasi parlemen tanpa memanipulasi variabel. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” fenomena terjadi serta mengidentifikasi pola interaksi yang muncul dalam konteks hubungan internasional (Kim, Sefcik, & Bradway, 2016).

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu informasi yang telah dikumpulkan dan disediakan oleh pihak lain. Sumber data meliputi dokumen resmi Parlemen Indonesia, laporan dari pertemuan IPPP tahun 2018 dan 2024, siaran pers, artikel akademik, buku, dan artikel berita terkait. Alasan pemilihan data sekunder adalah karena fenomena yang diteliti bersifat institusional dan tercatat secara formal, sehingga analisis dapat dilakukan melalui analisis literatur dan dokumen (Wahyuni, 2022).

Unit analisis dalam studi ini adalah negara sebagai aktor dalam hubungan internasional, khususnya peran DPR RI sebagai perwakilan Indonesia dalam forum IPPP dan reaksi negara-negara Pasifik terhadap narasi yang dibangun. Analisis berfokus pada pertukaran antarparlemen yang timbul dari dua pertemuan IPPP dan dinamika yang terlihat dalam forum terkait seperti *Melanesian Spearhead Group* (MSG).

Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur yang menganalisis dokumen resmi, laporan pertemuan, dan publikasi akademik. Peneliti juga memanfaatkan artikel berita dan siaran pers untuk melengkapi informasi mengenai konteks politik dan diplomatik seputar IPPP. Proses ini melibatkan identifikasi tema-tema kunci dalam dokumen IPPP, seperti agenda kerja sama, pernyataan resmi, dan strategi komunikasi yang digunakan oleh DPR RI.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti tahapan yang diuraikan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu:

1. Reduksi Data: Memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian (misalnya, narasi tentang pembangunan Papua dan bentuk strategi diplomasi parlemen).
2. Penyajian Data: mengorganisasi data ke dalam uraian tematik yang mencerminkan keterkaitan antara IPPP, diplomasi parlemen, dan kekuatan naratif.
3. Penarikan Kesimpulan – menginterpretasikan temuan berdasarkan kerangka konseptual yang digunakan, yaitu konsep *Parliamentary Diplomacy* dan *Narrative Power*.

Temuan analitis disajikan sebagai narasi tematik yang mengintegrasikan data empiris dengan konsep teoretis. Penyajian ini bertujuan untuk secara komprehensif menunjukkan peran IPPP dalam menekan dukungan terhadap segregasi Papua sambil menjelaskan bagaimana diplomasi parlemen memanfaatkan kekuatan naratif untuk membentuk persepsi dan preferensi negara-negara Pasifik.

III. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan

Keterkaitan IPPP dengan Isu Segregasi Papua

Isu segregasi Papua bukan lagi menjadi isu domestik biasa, namun telah bertransformasi dan berkembang ke ranah internasional. Hal tersebut ditandai melalui dukungan yang diberikan kepada organisasi pro-segregasi (dalam tulisan kali ini ULMWP dan OPM) oleh negara di Kawasan Pasifi. Dukungan ini terwujud dan tercermin dalam beberapa kesempatan di forum multilateral, misalnya melalui pemberian status *observer* kepada ULMWP di *Melanesian Spearhead Group* (MSG) pada 2015. Internasionalisasi isu Papua menimbulkan tantangan serius bagi Indonesia karena berpotensi mengganggu prinsip kedaulatan dan integritas teritorial. Dalam konteks ini, IPPP hadir sebagai instrumen diplomasi parlemen yang dirancang untuk meredam dukungan eksternal melalui pendekatan diplomatik dan kerja sama regional. Forum ini tidak hanya mengusung agenda pembangunan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengelola narasi tentang Papua agar tetap berada dalam bingkai isu domestik.

Strategi Diplomasi Parlemen melalui IPPP

Diplomasi parlemen yang dijalankan DPR RI melalui IPPP mengadopsi pendekatan *Track 1½ diplomacy*, yang memadukan kredibilitas resmi dengan fleksibilitas non-protokoler. IPPP pertama (2018) dan kedua (2024) berfokus pada tema-tema utama seperti ekonomi biru, pengembangan sumber daya manusia, dan konektivitas antardaerah. Meskipun dokumen resmi tidak secara eksplisit menyebutkan isu segregasi Papua, forum tersebut berfungsi sebagai platform untuk membahas pengembangan Provinsi Papua, termasuk proyek infrastruktur, perluasan wilayah provinsi, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pendekatan ini sejalan dengan konsep soft power, yang memprioritaskan kerja sama dan persuasi melalui nilai-nilai bersama daripada konfrontasi.

Manajemen Narasi dan Kekuatan Naratif

Dalam perspektif *narrative power*, IPPP berfungsi sebagai arena produksi dan peredaran narasi yang menggeser wacana dari “pelanggaran HAM” menuju “pembangunan inklusif”. DPR RI sebagai narator memanfaatkan IPPP untuk menekankan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang sedang mengalami percepatan pembangunan. Narasi ini diperkuat dengan data konkret, seperti alokasi dana pembangunan lebih dari USD 74 miliar antara 2014–2022, pembangunan bandara dan pelabuhan, serta pemekaran empat provinsi baru untuk meningkatkan akses layanan publik. Penyampaian narasi ini dalam forum IPPP, khususnya melalui dialog tertutup dengan anggota MSG, berhasil membentuk persepsi positif sejumlah negara Pasifik, yang tercermin dalam pernyataan penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia dan penolakan MSG terhadap permohonan keanggotaan penuh ULMWP pada KTT 2023.

Dampak Diplomasi Parlemen terhadap Dukungan Pasifik

Efektivitas IPPP dapat diukur melalui dua indikator utama: pertama, konsistensi komitmen negara-negara Pasifik terhadap prinsip non-intervensi atau kehormatan kedaulatan masing – masing negara. Tercermin dampaknya sebagaimana tercantum dalam komunikasi IPPP 2018 dan 2024 serta keputusan MSG yang menolak aplikasi ULMWP untuk menjadi anggota penuh. Meskipun dukungan simbolik terhadap isu Papua masih muncul, terutama dari Vanuatu, dinamika ini menunjukkan bahwa IPPP mampu memberikan pengaruh terhadap kalkulasi strategis negara-negara Pasifik dengan menekankan manfaat kerja sama ekonomi, maritim, dan sosial budaya. Hal ini sejalan dengan temuan Prasetyo dan Zahidi (2022) bahwa diplomasi berbasis kerja sama teknis dan pembangunan lebih efektif dalam meredam isu sensitif dibandingkan pendekatan konfrontatif.

Tantangan dan Implikasi

Meski IPPP menunjukkan capaian positif, tantangan tetap ada. Absennya Vanuatu dalam kedua pertemuan IPPP menandakan adanya hambatan dalam menjangkau aktor yang paling vokal mendukung isu Papua. Selain itu, keberlanjutan IPPP perlu dijaga agar tidak berhenti pada forum dua tahunan, melainkan berkembang menjadi mekanisme terlembaga seperti majelis parlemen regional. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya penguatan diplomasi naratif melalui kanal komunikasi yang lebih intensif, termasuk pertukaran budaya, pendidikan, dan kerja sama riset maritim, yang relevan dengan kepentingan negara-negara Pasifik.

IV. Penutup

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia melalui Diplomasi Parlemennya melaksanakan IPPP untuk meredam dukungan kawasan Pasifik terhadap segregasi Papua. IPPP memberikan kesempatan pemerintah Indonesia membentuk keterlibatan diplomatik. Pemerintah Indonesia dapat menjalin, membangun, berpartisipasi dalam hubungan antar negara serta regional kawasan Pasifik melalui perundingan, dialog, kerja sama, mediasi, dan aktivitas serupa untuk pengaruh dengan tujuan penanganan peningkatan dukungan terhadap isu segregasi Papua. Hal ini terbukti dari fakta bahwa ULMWP yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan beberapa negara di Pasifik termasuk negara – negara MSG, yang pada akhirnya tidak berhasil mendapat status keanggotaan penuh.

Upaya IPPP ini terbukti karena keputusan MSG pada KTT 2023, di komunikasi KTT tersebut disampaikan bahwa MSG tidak menyepakati aplikasi keanggotaan ULMWP dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk menjadi anggota penuh MSG dan perlu peninjauan kembali dari Perjanjian Pembentukan MSG. Secara lebih dalam alasan lain yang bisa ditemukan adalah perhitungan dari beberapa negara MSG yang memperhatikan hubungannya dengan Indonesia, melihat peran Indonesia di kawasan Pasifik yang semakin meningkat dan kesediaannya dalam kerja sama.

Selain keterlibatan diplomatik, IPPP secara mengkhusus memberikan kesempatan pemerintah Indonesia memanajemen narasi yang sejalan dengan tujuan penanganan isu tersebut. Melalui IPPP, pemerintah Indonesia berperan besar sebagai aktor yang meluruskan narasi bahwa terdapat tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi sumber ketidakpuasan

masyarakat pro segregasi. Pemerintah Indonesia memberikan batasan bahwa masalah segregasi Papua bersifat nasional dan membutuhkan solusi dari dalam (internal), bukan internasionalisasi isu. IPPP berhasil diupayakan menjadi suatu forum keterhubungan Indonesia dengan Pasifik demi penanganan isu segregasi.

Indonesia sebagai aktor menyampaikan kebenaran versi pemerintahannya dan menggunakan materi perkembangan di Papua dan kemampuannya sebagai negara berkembang sebagai bentuk pemberian. Hal tersebut disampaikan dalam forum IPPP sebagai wadah dan perwakilan – perwakilan setiap negara di kawasan Pasifik yang hadir menjadi audiens atau penerima narasi tersebut. Narasi yang telah disampaikan nantinya akan beredar dan berkembang di audiens. Selanjutnya, muncul penerimaan isi narasi ataupun penolakan dari para audiens.

IPPP memunculkan pengaruh kepada tindakan negara – negara Pasifik untuk menolak memberikan dukungan terhadap ULMWP dan penghormatan kedaulatan dari setiap pihak yang hadir dalam IPPP. Melalui penjelasan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa Indonesia melalui IPPP mengupayakan penanganan dukungan terhadap segregasi Papua dengan mengandalkan keterlibatan diplomatik dalam diplomasi parlemen sebagai perbaikan yang melibatkan kerja sama serta memanajemen narasi dengan meluruskan narasi pelanggaran hak asasi manusia dan mengalihkannya ke kapabilitas negara berkembang dalam melaksanakan pembangunan.

Saran

Penelitian ini telah berusaha untuk mengidentifikasi upaya – upaya pemerintah Indonesia untuk penanganan isu meningkatnya dukungan segregasi Papua di kawasan Pasifik melalui IPPP. Lalu dibuktikan bahwa melalui IPPP, upaya yang menjadi penanganan meliputi keterlibatan diplomatik dan manajemen narasi yang sejalan dengan tujuan. Untuk pengembangan keilmuan, dapat dilaksanakan penelitian yang mengidentifikasi hambatan IPPP dalam bagian ketidakhadiran beberapa negara seperti Vanuatu. Vanuatu yang termasuk negara aktif dalam kawasan Pasifik tidak hadir dalam kedua pertemuan IPPP.

Penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis lebih lanjut tindakan – tindakan negara di kawasan Pasifik yang tidak hadir dalam IPPP. Negara tersebut belum bisa diketahui posisinya dalam mendukung tujuan IPPP. IPPP dalam manajemen narasinya berkaitan dengan tindakan organisasi MSG. Representasi Vanuatu juga diperlukan dalam rapat antar parlemen MSG, mengingat Vanuatu merupakan anggota vital dari organisasi tersebut. Peneliti selanjutnya bisa menelaah lebih lanjut bagaimana absennya negara terkait memengaruhi efektivitas pertemuan dan isu yang dibahas. Hal ini sangat diperlukan untuk secara tuntas membahas isu segregasi di Papua dikarenakan Vanuatu sebagai negara sempat vokal terhadap isu tersebut.

Daftar Pustaka

Alstyne, R. W. van, & Morgenthau, H. J. (1951). In defense of the national interest: A critical examination of American foreign policy. *The Mississippi Valley Historical Review*, 38(3). <https://doi.org/10.2307/1889069>

Antara News. (2023). Fulfilling Papuans' quest for development. <https://en.antaranews.com/news/270690/fulfilling-papuans-quest-for-development>

Berridge, G. R. (2015). *Diplomacy: Theory and practice* (5th ed.). Palgrave Macmillan.
<https://doi.org/10.1057/9781137445520>

CNN Indonesia. (2023). Apa alasan negara Melanesia tolak ULMWP Benny Wenda jadi anggota.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230829151351-113-991918>

Gang, H. (2022). The application of narrative research in international relations. *Proceedings of the 2022 3rd International Conference on Language, Art and Cultural Exchange*, 258–261. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/asehr.k.220706.052>

Götz, N. (2005). On the origins of ‘parliamentary diplomacy’: Scandinavian ‘bloc politics’ and delegation policy in the League of Nations. *Cooperation and Conflict*, 40(3), 263–279. <https://doi.org/10.1177/0010836705055066>

Hagström, L., & Gustafsson, K. (2019). Narrative power: How storytelling shapes East Asian international politics. *Cambridge Review of International Affairs*, 32(4), 387–406. <https://doi.org/10.1080/09557571.2019.1623498>

Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2016). Characteristics of qualitative descriptive studies: A systematic review. *Research in Nursing & Health*, 40(1), 23–42.

KSAP DPR RI. (2018). *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership Chair’s Summary*. <https://ksap.dpr.go.id/ipp/page/detail/id/298>

KSAP DPR RI. (2024). *Report of 2nd Meeting of IPPP*. <https://ksap.dpr.go.id/ipp2024/pag/page/detail/id/532>

Kusuma, P. D., Widhiyoga, G., & Murdani, A. D. (2021). Analisis dukungan Vanuatu terhadap upaya kemerdekaan Papua. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(1), 45–57.

Mas'oed, M. (1994). *Ilmu hubungan internasional: Disiplin dan metodologi*. Pustaka LP3ES.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Missiou-Ladi, A. (1987). Coercive diplomacy in Greek interstate relations. *The Classical Quarterly*, 37(2), 336–345. <https://doi.org/10.1017/S0009838800030548>

Netto, V., Krenz, K., Fiszon, M., Peres, O., & Rosalino, D. (2024). Decoding segregation: Navigating a century of segregation research across disciplines and introducing a bottom-up ontology. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.08374>

Nye, J. S. (1999). Redefining the national interest. *Foreign Affairs*, 78(4), 22–35. <https://doi.org/10.2307/20049361>

Prasetyo, H., & Zahidi, M. S. (2022). Diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan dalam rangka menjaga kedaulatan Papua. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 5(2), 15–22. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/14605>

Premdas, R. R. (1985). The Organisasi Papua Merdeka in Irian Jaya: Continuity and change in Papua New Guinea's relations with Indonesia. *Far Eastern Survey*, 25(10), 1055–1074. <https://doi.org/10.2307/2644181>

Rahim, A. S., & Timur, F. G. C. (2021). Status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam hukum internasional terhadap kedaulatan Indonesia. *Interdependence Journal of International Studies*, 2(1), 11–30.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suropati, U. (2020). Solusi komprehensif menuju Papua baru: Penyelesaian konflik Papua secara damai, adil dan bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(1), 73–89. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i1.52>

Tawakal, A., Hakiem, F. N., & Rifai, M. (2024). Urgensi penetapan status Organisasi Papua Merdeka sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 18900–18910. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.13517>

Wideslatu, R. (2024). Diplomatic strategy of the Indonesian government in maintaining Papua as part of sovereignty. *Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*, 816–837. <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2957>

Winardi. (2023). The impact of the formation of three new provinces on Papua's economic performance. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.3.1.43-55>

Wyeth, G. (2023). For the Melanesian Spearhead Group, West Papua presents a challenge. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2023/08/for-the-melanesian-spearhead-group-west-papua-presents-a-challenge>